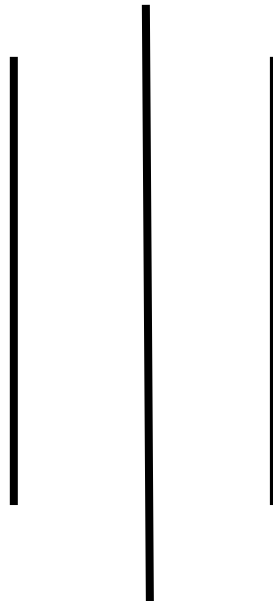




DOKUMEN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Analisa kebutuhan dana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 berdasarkan indikator dan targetnya yang merupakan bagian tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dalam urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2025. Mengutamakan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Penyusunan Rencana Kerja diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan informasi, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, melaksanakan Diskusi Fokus antar sub bagian/fungsional yang dilakukan pembahasan secara formal dengan melibatkan seluruh bidang yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik serta penetapan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik untuk dapat dilaksanakan dalam program dan kegiatan tahun 2025.

Dalam proses selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan (2024) dan tahun-tahun sebelumnya (2023). Renja Tahun 2025 menjadi pedoman Penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik sebagai perwujudan dari undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Gresik Tahun 2021-2026.

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025
18. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini adalah sebagai :

1. Acuan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Gresik tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2025.

3. Mewujudkan kesinambungan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, RKPD dan RPJMD Kabupaten Gresik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Gresik

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Kerja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ditunjang dengan anggaran Belanja. Pagu APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2023 sebesar **Rp 16.649.956.306,00** (Enam Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam). Pagu akhir PAPBD tahun 2023 menjadi sebesar **Rp 14.959.988.537,-** (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Pagu tersebut di atas untuk melaksanakan 5 program, 11 kegiatan dan 39 sub kegiatan.

pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 melalui 5 (lima) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran/utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2023, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat **pada tabel** sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ANGGARAN		
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	1. Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	1.444.833.491	1.444.833.491	100%
		2. Pertumbuhan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan			
		3. Pertumbuhan Konten Edukasi yang Dipublikasikan			
2	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	1. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE	2.976.612.921	2.966.612.621	99,66%
		2. Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE			
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika	Persentase Perangkat daerah yang Terlayani Infrastruktur TI	4.600.001.725	4.593.563.356	99,86

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ANGGARAN		
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	(TI)				
4	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Pertumbuhan Analisa Data Sektoral yang Disediakan	106.274.000	106,274,000.00	100%
5	Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	99.955.146	99.945.646	99.99%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa analisis kinerja Anggaran disajikan dalam perbandingan antara target alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase capaian realisasi. Pada tahun 2023 pencapaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 3 (tiga) sasaran terealisasi sebesar **Rp 14.740.486.620,-** (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) ekivalen 98,53% dengan efisiensi **Rp 219.501.916,-** (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah) ekivalen dengan 1,47%. Efisiensi ini diperoleh dari sisa belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, belanja pembayaran pajak, bea dan perijinan

Pada tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2024 diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Gresik, pada dasarnya kegiatan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik mendukung pembangunan dan system pemerintahan yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD dalam bidang teknologi informatika terutama dalam pencapaian indeks system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra s/d Tahun 2024	
						Targ et Renj a PD Tahu n 2023	Realisa si renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisas i (%)		Realisa si capaian Progra m dan Kegiat an s/d Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7x100	10	11=6+8+10	12=11/5x100
	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika									
	2.16.	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika									
	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100	100	100	100	100	100	100	100,00
	2.16.01.2.01	Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan pelaporan	8	3	2	2	100	2	7	87,50

1	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan	150	150	-	-	-	-	150	100,00
			Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	3	2	2	100	1	6	75,00
2	2.16.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKJIP, LPPD, SAKIP, Laporan Monev Kegiatan)	72	24	12	12	100	12	48	66,67
Rata - rata capaian kinerja (%)										100,00	87,50
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	18	6	3	3	100	3	12	66,67
1	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN DISKOMINFO	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136	-	34	34	100	34	68	50,00
2	2.16.01.2.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	-	1	1	100	1	2	50,00

4	2.16.01.2.02.07	Koordinasi Dan Penyiapan Laporan Keuangan Bulanan / Tribunalan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran perangkat daerah	6	6		-	0		6	100,00
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	-	1	1	100	1	2	50,00
Rata - rata capaian kinerja (%) 100,00											66,67
Predikat Kinerja Sangat Tinggi											Sedang
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	18	6	3	-	-	3	28	155,56
5	2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian kerja lapangan	136	-	-			-	0	0,00
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	-	-	-	0	1	1	33,33
5	2.16.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								0	0
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	-	-	-	0	1	1	33,33
5	2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Cukai kepada masyarakat	16	8	-	-	0	-	8	50,00

			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	-	-	-	0	50	50	16,67
Rata - rata capaian kinerja (%)										0,00	155,56
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	42	14	7	7	100	7	28	66,67
7	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerbangan Bangunan kantor								0	
		2021-2022 (renstra lama)	Jumlah Bahan Alat Listrik Jumlah Media Converter	16	16	-	-	0	-	16	100,00
		2023-2026 (review renstra)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	-	1	1	100	1	2	50,00
8	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan kantor								0	
			Jumlah Alat Pendingin Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Bahan Komputer Jumlah Komputer dan Peralatan Komputer	92	92	-	-	0	-	92	100,00
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	-	6	2	33	6	8	33,33

	2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								0	
			Jumlah Bahan Dan Peralatan pembersih	46	46	-	-	0	-	46	100,00
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	-	1	1	100	1	2	50,00
	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								0	
			Jumlah Makanan dan Minuman	550	550	-	-	0	-	550	100,00
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	-	1	1	100	1	2	50,00
	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan								0	
			Jumlah Banner Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan Jumlah jasa Publikasi Ucapan	2874	2874	-	-	0	-	2874	100,00
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	-	2	2	100	2	4	50,00
	2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan								0	
			Jumlah Bahan Bacaan	8	8	-	-	0	-	8	100,00

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16	-	1	1	100	1	2	12,50
	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd								0	
			Jumlah Fasilitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4	4	-	-	0	-	4	100,00
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	-	2	2	100	2	4	50,00
Rata - rata capaian kinerja (%)											66,67
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sedang
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	4	2	-	-	2	6	50,00
	2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								0	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8	-	-	-	0	5	5	62,50
	2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel								0	0
			Jumlah Mebel/Kursi	20	20	-	-	0	-	20	100,00

[illegible]

			3. Persentase permintaan data yang difasilitasi PPID	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00
	2.16.02.2.01	Pengelolaan informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	-. Jumlah panggilan kedaruratan yg difasilitasi	1.185	513	255	1836	720	255	2.604	219,75
			-. Jumlah Konten penyelenggaraan pemerintahan yang Di Publikasikan melalui media	5.209	6.017	-	-	0	-	6.017	115,51
			-. Jumlah Media yang dimanfaatkan untuk publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan	15	15	-	-	0	-	15	100,00
			-. Jumlah Pengaduan yang masuk dan difasilitasi	683	480	-	-	0	-	480	70,28
			-. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	2	7	-	-	0	-	7	350,00
			-. persentase Pengaduan yang ditanggapi tepat waktu	400%	-	100%	100%	100,00	100%	100%	25,00
			-. persentase permohonan informasi publik yang dicukupi	400%	-	100%	100%	100,00	100%	100%	25,00
			-. Jumlah informasi publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	100	-	25	28	112,00	25	53	53,00
			-. Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan	11.498	-	2.668	1.433	53,71	2.668	4.101	35,67

			Jumlah pemeliharaan website gresikkab.go.id	2	2		-			2	
			Jumlah pemeliharaan website SiDesa	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			Jumlah pemeliharaan website siklip	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			Jumlah pemeliharaan website PPID	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			Jumlah lisensi fliping	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			Jumlah rapat koordinasi update data penyelenggaraan pemerintahan dengan OPD	7	7	-	-	0	-	7	100,00
			jumlah koordinasi kegiatan OPD yang dipublikasikan	51	51	-	-	0	-	51	100,00
			Jumlah lisensi cpanel tahunan	3	3	-	-	0	-	3	100,00
			jumlah web hosting OPD yang di kelola	45	45	-	-	0	-	45	100,00
			Jumlah Pembelian PC untuk desain grafis	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	-	1	1	100	1	2	200,00
	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik								0	
			Pembuatan Perda Radio suara Gresik	1	1		-	0		1	100,00

			Jumlah Koordinasi dengan Balmon dan pusat terkait perijinan Radio	3	3	-	-	0	-	3	100,00
			Jumlah luran tahunan frekuensi radio	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			Jumlah sewa internet (Mbps)	30	30	-	-	0	-	30	100,00
			Jumlah Tenaga Penyiar yang di rekrut	15	15	-	-	0	-	15	100,00
			Jumlah Tenaga teknisi radio	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			Jumlah Tenaga konten kreatif untuk sosial media	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			Jumlah Tenaga konten kreatif untuk video	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			jumlah lisensi lagu yang dibeli	950	950	-	-	0	-	950	100,00
			Jumlah lisensi radiobost	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			Jumlah lisensi Adobe Audition	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			jumlah pemeliharaan pemancar radio FM	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			jumlah Pemeliharaan peralatan streaming	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			jumlah reportase yang dilakukan	372	372	-	-	0	-	372	100,00
			jumlah domain dan hosting suaragresik.id	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			jumlah penayangan di media televisi	2	2	-	-	0	-	2	100,00

			Jumlah rapat monitoring dan evaluasi crew radio	92	92	-	-	0	-	92	100,00
			Jumlah rapat monitoring dan evaluasi media	12	12	-	-	0	-	12	100,00
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4	-	1	1	100	1	2	50,00
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik					-	0		0	0
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4	-	1	1	100	1	2	50,00
	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media					-	0		0	0
			Jumlah Layanan Hubungan Media	4	-	1	1	100	1	2	50,00
	2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis								0	
			Jumlah Tenaga Call Taker dan dispatch yang di rekrut	21	21		-	0		21	100,00
			jumlah tenaga sound dan multi media center	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			Jumlah sewa aplikasi kedaruratan call 112	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			Jumlah sewa Backup internet (Mbps)	50	50	-	-	0	-	50	100,00
			Jumlah Pembangunan media Centre	1	-		-	0		0	0,00

			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	4	-	1	1	100	1	2	50,00
	2.16.02.0.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik					-	0		0	0
			Jumlah Jatim Kominfo Festival (JKF) yang di ikuti oleh KIM	1	1		-	0		1	100,00
			Jumlah pelatihan untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	4	5	-	-	0	-	5	125,00
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	520	-	130	65	50	130	195	37,50
	2.16.02.0.01.12	penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas					-	0		0	0
			Jumlah rekomendasi Branding Kabupaten Gresik	5	-		-	0		0	0,00
			Jumlah Kebijakan Branding Kabupaten Gresik	2	-		-	0		0	0,00
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4	-	-	-	0	1	1	25,00

	2.16.02.0.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					-	0		0	0
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12	-	3	4	133	3	7	58,33
Rata - rata capaian kinerja (%)								183,85			219,75
Predikat Kinerja								Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								0			100,00
Predikat Kinerja								Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
	2.16.03	Program Aplikasi Informatika	1. Presentase OPD yang Memanfaatkan Ruang Server	150%	56%	25%	100%	400	27%	183%	122,00
			2. Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Aset TIK	252%	2%	25%	2%	8	50%	54%	21,43
			3. Persentase OPD yang Menggunakan Sistem Penghubung Layanan	252%	2%	25%	26,08%	104	50%	78%	30,95
			4. Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Data	252%	2%	25%	26,08%	104	50%	78%	30,95
			1. Prosentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi	600%	200%	100%	26,08%	26	100%	326%	54,33

			2. Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	600%	200%	100%	100%	100	100%	300%	50,00
			3. Persentase OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	525%	164%	100%	100%	100	100%	364%	69,33
			4. Persentase aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi	272%	19%	33%	33%	100	53%	105%	38,60
			5. Persentase OPD yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	210%	30%	30%	65%	217	50%	145%	69,05
	2.16.03.2.01.03	Pengelolaan Nama Domain Yng Telah Di Tetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /kota	-. Kapasitas Bandwith Internet untuk perkantoran pemerintahan	9,60	1	1,60	1,60	100,00	1,60	4	38,54
			- Jumlah kelurahan, kecamatan dan OPD yang terlayani jaringan intranet	176	176	-	-	0	-	176	100,00
			- jumlah pemeliharaan jaringan intra	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			- jumlah pemeliharaan jaringan Fiber Optik	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			- jumlah pemeliharaan jalur CCTV	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			1. Jumlah OPD yang dibina untuk menerapkan manajemen Aset TIK	50	-	5	5,00	100,00	10	15	30,00

			2. Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah	24.170 jam	-	-	-	0	7.884 jam (90% dari 8.760 jam)	7.884 jam (90% dari 8.760 jam)	32,00
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah								0	
			Kapasitas Bandwith Internet untuk perkantoran pemerintahan	1,50	1,50	-	-	0	-	2	100,00
			Jumlah Kelurahan,Kecamatan Dan OPD Yang Terlayani Jaringan Intranet	176	176	-	-	0	-	176	100,00
			Jumlah metro untuk mendukung jaringan intra pemerintah	88	52	-	-	0	-	52	59,09
			Jumlah tenaga ahli jaringan yang di rekrut	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			jumlah server clustering yang diadakan	4	4	-	-	0	-	4	100,00
			Jumlah iuran As number (tahunan)	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			jumlah pemeliharaan jaringan intra	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			jumlah pemeliharaan jaringan Fiber Optik	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			jumlah pemeliharaan jalur CCTV	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			rapat koordinasi terkait penggunaan jaringan intra	5	5	-	-	0	-	5	100,00

			jumlah perjalanan dinas pengecekan troubleshooting jaringan	36	36	-	-	0	-	36	100,00
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4	-	1	1	100	1	2	50,00
Rata - rata capaian kinerja (%)								100,00			38,54
Predikat Kinerja								Sangat Tinggi			Sangat Rendah
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	- . Jumlah server backup yang di adakan	3	1	-	-	0	-	1	33,33
			-. Jumlah UPS yang diadakan	2	1	-	-	0	-	1	50,00
			-. Jumlah tenaga ahli programer yang di rekrut	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			-. Kapasitas server clustering	1.220	986	-	-	0	-	986	80,85
			-. Kapasitas server backup data	24	44	-	-	0	-	44	183,33
			-. Kapasitas Backup Listrik (UPS)	12	15	-	-	0	-	15	125,00
			-. Manajemen Data Warehouse/Big Data	1	-	-	-	0	-	-	0,00
			-. Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	13	-	2	4	200,00	-	4	30,77

			-. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	15	-	3	2	66,67	-	2	13,33
			-. Jumlah OPD yang mengakses data dari Sistem Penghubung Layanan	26	-	5	5	100,00	-	5	19,23
			-. Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	15	-	3	2	66,67	-	2	13,33
			-. Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi	4	4		-	0		4	100,00
			-. Jumlah Indikator SPBE yang dievaluasi	94	94	-	-	0	-	94	100,00
			-. Jumlah OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	60	56	-	-	0	-	56	93,33
			-. jumlah aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			-. Jumlah Opd yang menerapkan manajemen Layanan SPBE	6	6	-	-	0	-	6	100,00
			1. Jumlah pedoman pelaksanaan SPBE yang disusun dan dievaluasi	8	-	2	2	100,00	2	4	50,00
			2. Jumlah Dokumen Perencanaan SPBE yang dievaluasi	8	-	2	2	100,00	2	4	50,00

			3. Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle)	39	-	5	5	100,00	8	13	33,33
			4. Jumlah Indikator Evaluasi SPBE yang dipenuhi Data Dukung dan Narasinya	188	-	47	47	100,00	47	94	50,00
			-. Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	18	-	4	3	75,00		3	16,67
			-. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	14	-	3	2	66,67	-	2	14,29
			1. Jumlah VPS yang dikelola	585	-	-	-	0	180	180	30,77
			2. Jumlah API yang dikelola	66	-	-	-	0	18	18	27,27
			5. Jumlah layanan yang dikelola melalui service desk5.	99	-	-	-	0	31	31	31,31
	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota					-			0	
			1. Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi	3	3	-	-	0	-	3	100,00
			2. Jumlah Kebijakan SPBE yang disusun	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			3. Jumlah SOP SPBE yang disusun	4	4	-	-	0	-	4	100,00

			4. Jumlah Rapat Koordinasi SPBE	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8	-	2	3	150	2	5	62,50
	2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik								0	
			1. Jumlah FGD Penerapan Peta Rencana SPBE	12	12	-	-	0	-	12	100,00
			2. Jumlah OPD yang difasilitasi dalam Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE	36	76	-	-	0	-	76	211,11
			Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	8	-	2	4	200	2	6	75,00
	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah								0	
			Jumlah perencanaan Pembangunan media centre	1	1		-	0		1	100,00
			Jumlah Pembangunan Ruang Server Baru	1	-	-	-	0	-	0	0,00

			Jumlah Pendeteksi suhu ruangan	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			Jumlah AC central	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			Jumlah server clustering yang di adakan	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			Jumlah server backup yang di adakan	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			Jumlah UPS yang diadakan	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			Jumlah listrik premium yang diadakan	1	1	1	1	100	1	3	300,00
			Jumlah rapat koordinasi terkait pemanfaatan ruang server oleh OPO	10	10		-	0		10	100,00
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	4	-	1	-	-	1	1	25,00
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik								0	
			Jumlah Lisensi Office 365 yang disewa;	3	1	-	-	0	-	1	33,33
			Jumlah Lisensi Zoom yang disewa;	10	9	-	-	0	-	9	90,00
			Jumlah Aplikasi Gresikpedia yang disewa;	23	23	-	-	0	-	23	100,00
			Jumlah Tenaga Ahli Programmer yang direkrut;	2	2	-	-	0	-	2	100,00

		Cerdas									
			1. FGD Penerapan Smart City	14	14	-	-	0	-	14	100,00
			2. Jumlah Rapat Evaluasi Smart City	5	5	-	-	0	-	5	100,00
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	24	-	6	6	100	6	12	50,00
	2.16.03.2.02.10	Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah								0	0
			Rapat OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE (4 x 48 OPD)	48	48	-			-	48	
			Jasa konsultasi Pengelolaan Layanan SPBE	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			Pembangunan Single sign on	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			Jumlah Pelatihan Manajemen jaringan OPD	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			Jumlah Pelatihan Manajemen data	2	2	-	-	0	-	2	100,00

			Jumlah Pelatihan Sistem Penghubung layanan	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4	-	1	1	100	1	2	50,00
	2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE								0	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	16	-	4	4	100	4	8	50,00
Rata - rata capaian kinerja (%)								97,50			33,33
Predikat Kinerja								Sangat Tinggi			Sangat Rendah
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PROGRAM APILKASI INFORMATIKA								128,82			54,07
Predikat Kinerja								Sangat Tinggi			Rendah
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Komunikasi dan Informatika											
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								114,41			84,69
Predikat Kinerja								Sangat Tinggi			Tinggi

	2.20.	Urusan Pemerintah Bidang Statistik									
	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	133%	20%	20%	27%	135	27%	74%	55,64
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	- Jumlah Data Sektoral lingkup OPD yang disusun	6	3		-	0	-	3	50,00
			-. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Satu Data	12	-	3	3,00	100	-	3	25,00
			1. Jumlah OPD yang menyusun atau mengolah data secara terpilah gender	18	-	3	8,00	267	4	12	66,67
			-. Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	18	-	-	-	0	-	-	0,00
			2.Jumlah OPD yang mengumpulkan data statistik sektoral	135	-	-	-	0	35	35	25,93
			3. Jumlah Data Induk yang dikelola	12	-	-	-	0	2	2	16,67
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan ,Pengolahan , Analisis Dan Di Semnasi Data Statistik Sektoral					-	0		0	0
			Jumlah Cetakan ke dua Buku DDA / KDA yang diterbitkan BPS Kabupaten Gresik	100	-	-			-	0	

			Jumlah rapat pembuatan Kebijakan satu data	6	-	-	-	0	-	0	0,00
			Jumlah Sosialisasi tentang data sektoral OPD	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			Jumlah Sosialisasi tentang Wali data	2	2	-	-	0	-	2	100,00
			Jumlah rapat koordinasi data stastik sektoral	4	4	-	-	0	-	4	100,00
			Jumlah penyusunan data inflasi Kabupaten Gresik	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			Jumlah penyusunan data anlisa bencana Balongpanggang Benjeng Cerme	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			Jumlah penyusunan data NTN dan NTP	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			Jumlah tenaga ahli analis statistik yang di rekrut	1	1	-	-	0	-	1	100,00
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4	-	1	1	100	1	2	50,00
	2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi					-	0		0	0

	2.21.02.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penanganan Serangan Cyber	600%	100%	100%	100%	100,00	100%	300%	50,00
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Infomasi Pemeintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Keamanan Informasi	502%	102%	100%	100%	100,00	-	300%	59,76
			1. Jumlah OPD yang menerapkan management keamanan informasi	27	-	-	-	0	6	6	22,22
	2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								0	
			jumlah OPD yang diberikan pelatihan tentang keamanan informasi	58	58	0	-	0	0	58	100,00
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4	0	1	1	100	1	2	50,00

	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik					-	0		0	0
			Jumlah Firewall yang digunakan untuk keamanan jaringan	1	1	0	-	0	0	1	100,00
			Jumlah Pengamanan yang digunakan untuk mengamankan transmisi data antar dua sistem yang berbeda	2	2	0	-	0	0	2	100,00
			Jumlah user Antivirus	75	75	0	-	0	0	75	100,00
			Jumlah tenaga ahli untuk penanganan insiden keamanan yang di rekrut	3	3	0	-	0	0	3	100,00
			Jumlah maintanance email gresikkab.go.id	1	1	0	-	0	0	1	100,00
			Jumlah Sosialisasi arsitektur keamanan informasi	2	2	0	-	0	0	2	100,00
			Jumlah Sosialisasi Digital Signature	2	2	0	-	0	0	2	100,00
			Jumlah pelatihan penggunaan Digital Signature	5	5	0	-	0	0	5	100,00

			Jumlah evaluasi penggunaan Digital Signature	2	2	0	-	0	0	2	100,00
			Jumlah Perjalanan Dinas terkait penanganan keamanan infomasi	37	37	0	-	0	0	37	100,00
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4	0	1	2	200	1	3	75,00
Rata - rata capaian kinerja (%)								0			22,22
Predikat Kinerja								Sangat Tinggi			Sangat Rendah
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								100,00			50,00
Predikat Kinerja								Sangat Tinggi			Sangat Rendah
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Persandian										0	
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN PERSANDIAN								100,00			50,00
Predikat Kinerja								Sangat Tinggi			Sangat Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD tahun berikutnya :											

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kelembagaan dan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik.

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi dan informasi.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat guna terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
3. Menyediakan layanan administrasi perkantoran berbasis elektronik yang tertata dan handal serta meningkatkan mutu layanan publik dan layanan pemerintahan.
4. Mengintegrasikan aplikasi sistem informasi dan basis data yang terkoneksi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan portal layanan masyarakat mudah diakses.

Dalam rangka mengoptimalkan dan memaksimalkan tugas dan fungsi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dilakukan perubahan indikator sasaran dengan melakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2021-2026, alasan dilakukan perubahan indikator adalah sebagai berikut :

- sesuai Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dimana dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026, nilai indeks SPBE menjadi salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Gresik.

- Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan cascading dengan cara mengambil tingkat kematangan indikator SPBE sebagai indikator kinerja utama. Hal ini menyulitkan dalam melakukan pengukuran berkala (bulanan atau triwulanan) karena tingkat kematangan hanya bisa diukur oleh kementerian PANRB yang hasilnya keluar pada awal tahun berikutnya
- Indikator kinerja perangkat daerah seharusnya dinilai oleh Kepala Daerah, bukan Kementerian
- sesuai Permen PANRB No. 89 Tahun 2021 dijelaskan bahwa indikator harus memenuhi kriteria SMART, bersifat Spesifik (tidak bias) dan Measurable (memiliki ukuran kuantitatif) sedangkan tingkat kematangan merupakan ukuran kualitatif berikut disampaikan pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 dan Tahun 2024 (realisasi s.d TW II) serta proyeksi realisasi pada tahun 2025-2026.

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik

[illegible]

1. Persentase perangkat daerah yang terlayani infrastruktur TI	Informatika	0%	25%				97.22% (70 OPD / 72 OPD)				terdapat perubahan indikator sasaran renstra
3. Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	Bidang SPBE										Tahun 2024
1. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE		4	5				4				terdapat perubahan indikator sasaran renstra
2. Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE		3	3				3				
4. Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang yang disediakan	Bidang SPBE										Tahun 2024
1. Pertumbuhan Analisa Data Sektoral yang disediakan		4 (tahun 2022)	2 analisa (50%) ~ 6 dari 4 analisa data sektoral				4 analisa (100%) ~ 8 dari 4 analisa data sektoral				terdapat perubahan indikator sasaran renstra
5. Meningkatnya keamanan sistem elektronik	Bidang SPBE										Tahun 2024
1. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi		1	3				3				terdapat perubahan indikator sasaran renstra

Indikator	Bidang penanggung jawab	Baselin e	Target Renstra (perubahan) --- Kemendagri 900.1				Realisasi		Proyeksi Realisasi		Catatan Penting
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024 s/d TW II	Tahun 2025	Tahun 2026	
IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)											
1. Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	Bidang Statistik dan Informasi Publik										Indikator baru pada sasaran renstra
1. Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan		92,1%		92,2%	92,3%	92,4%		95,5%	92,3%	92,4%	
2. Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan		121		131	141	151		210	141	151	
3. Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan		1800		1810	1820	1830		1794	1820	1830	
2. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Bidang Teknologi Informatika										Indikator baru pada sasaran renstra
Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data		75% (6.570 jam dari 8.760 jam)		80% (7.008 jam dari 8.760 jam)	85% (7.446 jam dari 8.760 jam)	90% (7.884 jam dari 8.760 jam)		99,60 % (8611 jam dari 8.760 jam)	85% (7.446 jam dari 8.760 jam)	90% (7.884 jam dari 8.760 jam)	
3. Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	Bidang SPBE										Indikator baru pada sasaran renstra
1. Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi		100%		100%	100%	100%		87%	100%	100%	

2. Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah		75%		75%	75%	75%		25%	75%	75%	
4. Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang yang disediakan	Bidang SPBE										Indikator baru pada sasaran renstra
Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan		0		4 reko m	4 reko m	4 reko m		2 reko m	4 reko m	4 reko m	
5. Meningkatnya keamanan sistem elektronik	Bidang SPBE										Indikator baru pada sasaran renstra
Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi		18		30	40	58		16	40	58	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis Dinas Komunikasi Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

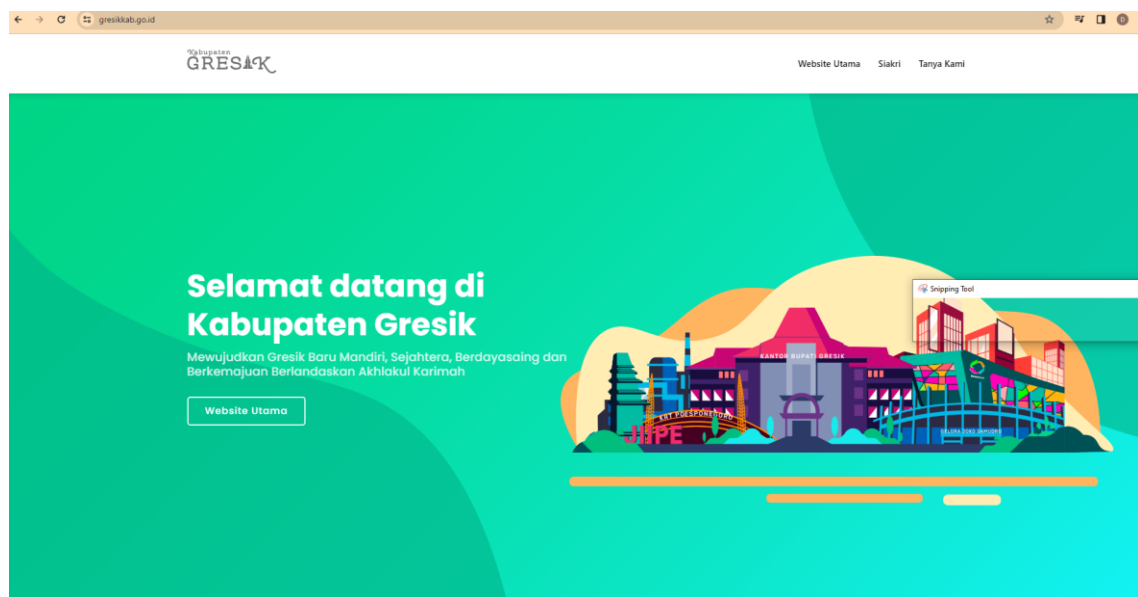
Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan

Pada sasaran strategis 1, “Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan” memiliki 3 indikator kinerja, dengan semua indikator tercapai.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAI AN
Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektor yang Dipublikasikan	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	5	125,00 %
	Pertumbuhan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan	10% ~ 55 dari 50 informasi	46%~ 73 dari 50 informasi	460%
	Pertumbuhan Konten Edukasi yang Dipublikasikan	2% ~1077 dari 1056 konten edukasi	9%~ 1150 dari 1056 konten edukasi	450%

Saat ini, keterbukaan informasi memberikan dampak besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gresik, sehingga penyebarluasan informasi harus lebih dioptimalkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik membentuk satu wadah internal yang diberi nama Gresik News Room, yang bertujuan untuk menjangring informasi terupdate, serta menyaring berita hoax terkait kegiatan pemerintahan. Saat ini masyarakat, terutama kaum milenial memiliki berbagai pilihan untuk mengakses layanan informasi yang disediakan oleh pemerintah seperti website Kabupaten Gresik (gresikkab.go.id), akun IG @pembkabgresik, youtube suaragresik, akun FB Pemerintah Kabupaten Gresik, Tiktok @pembkabgresik.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2023 guna mencapai sasaran strategis ke-1 adalah sebagai berikut :



Website gresikkab.go.id



Youtube Suara Gresik



Facebook Pemerintah Kabupaten Gresik



pemkabgresik

Follow

Message

3,756 posts

31.9K followers

235 following

Pemerintah Kabupaten Gresik

pemkabgresik

Digital creator

Instagram Resmi Pemerintah Kabupaten Gresik

Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika @kominfogresik

Website Resmi Pemkab Gresik

gresikkab.go.id/home + 1

POSTS

REELS

TAGGED



Instagram @pemkabgresik

TikTok

Search

+ Upload

Log in

For You

Following

Friends

Explore

LIVE

Profile

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Log in

Create TikTok effects, get a reward

About Newsroom Contact Careers
TikTok for Good Advertise
TikTok LIVE Creator Network
Developers Transparency
TikTok Rewards TikTok Embeds
TikTok Music
Help Safety Terms Privacy Policy
Privacy Center Creator Portal
Community Guidelines
See more



pemkabgresik

Pemerintah Kabupaten Gresik

Follow

27 Following 11.5K Followers 122.1K Likes

Official Account Pemerintah Kabupaten Gresik
Dikelola oleh
Diskominfo Gresik

Videos

Liked

Playlists



Jelajah Gresik

6 posts



Gresik icip icip

7 posts



Festival di Gresik

5 posts

Videos



Di Gresik ada Kienteng...



Ini lah wajah baru jalan ...



Sudah tau cerita tenta...



Gerakan Pangan Mura...



Berikut menanggapi b...



Gresik, 22 Februari 20...

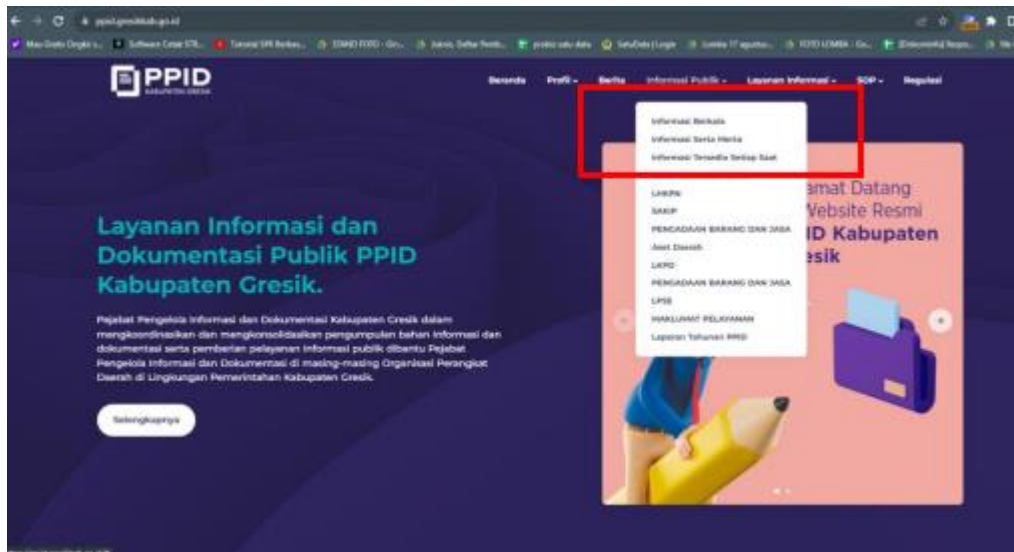


Ini desain log



Get app

Tiktok @pemkabgresik



Website ppid.gresikkab.go.id

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)

Pada sasaran strategis 2, “Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)” memiliki 1 indikator kinerja, dan tercapai dengan realisasi 97.22% (70 OPD / 72 OPD) dari target 25 % dengan tingkat capaian 389%.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2023 guna mencapai sasaran strategis ke-2 adalah sebagai berikut :



Pengecekan jaringan intra di Dinas Tenaga Kerja

**SASARAN
STRATEGIS 3**

Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE

Pada sasaran strategis 3, memiliki 2 indikator kinerja, 1 indikator telah melampaui target dan 1 indikator tidak tercapai. Tingkat kinerja pada Sasaran Strategis 3 dapat dilihat pada **Tabel 3.3** berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
Meningkatnya Tingkat Kematangan	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE	5	4	80%

Kapabilitas Proses SPBE	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3	5	166.7%
-------------------------	--	---	---	--------

Ketidaktercapaian pada indikator tersebut adalah karena Tim koordinasi SPBE telah melaksanakan program kerja dan telah dilakukan evaluasi secara berkala namun belum dilakukan perbaikan atas hasil evaluasi, Untuk meningkatkan kinerja sasaran strategis ini pada tahun yang akan datang Tim Koordinasi SPBE diupayakan perbaikan pada program kerja melalui pendampingan pelaksanaan program kerja pada tiap kelompok kerja dengan melibatkan semua Perangkat Daerah dan mengevaluasi kinerja tugas Tim Koordinasi SPBE secara berkala.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2023 guna mencapai sasaran strategis ke-1 “Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE” adalah sebagai berikut :



Dokumentasi Rapat Evaluasi Kebijakan SPBE



Dokumentasi Konsultasi Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE



Dokumentasi Rapat Monev Kinerja Tim Koordinas SPBE



Produk Hukum Terbaru

22 May 2023	SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR : 050/ 282 /HK/437.12/2023 TENTANG DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024
22 May 2023	SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR : 451/ 280 /HK/437.12/2023 TENTANG PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG KEPADA PIMPINAN CABANG PEMUDA MUHAMMADIYAH BALONGPANGGANG DESA KEDUNGPRING KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK
22 May 2023	SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR : 451/ 279 /HK/437.12/2023 TENTANG PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG KEPADA PIMPINAN ANAK CABANG MUSLIMAT NAHDILATUL ULAMA KEDAMENDAN DESA KATIMOH KECAMATAN KEDAMENDAN KABUPATEN GRESIK
17 May 2023	PERATURAN BUPATI Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026
17 May 2023	PERATURAN BUPATI Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa

Cari Produk Hukum

jenis

Semua

Nomor

Tahun

☒ Judul
☐ Konten

Percarian dilakukan dari judul produk hukum.

Status

- Tampilkan Semua -

Cari

Tampilan menu website <https://jdih.gresikkab.go.id/>

Tampilan Aplikasi GUS

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan

Pada sasaran strategis 4, memiliki 1 indikator kinerja, dengan tingkat capaian 200%.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang disediakan	Pertumbuhan Analisa Data Sektoral yang disediakan	2 analisa (50%) ~ 6 dari 4 analisa data sektoral	4 analisa (100%) ~ 8 dari 4 analisa data sektoral	200%

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2023 guna mencapai sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :



Kegiatan Peningkatan Budaya Literasi



Bimtek Reviu Metadata Statistik

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik

Pada sasaran strategis 5, “Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik” memiliki 1 indikator kinerja dengan tingkat capaian 100%.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
Meningkatnya keamanan sistem elektronik	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3	3	100%

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik mendukung fasilitas antara lain :

- Penyediaan, Pengelolaan Sistem Informasi melalui media elektronik dalam bentuk Domain Situs Web Pemerintah Kabupaten Gresik maupun Sub Domain yang dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah hingga Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini merupakan salah satu program dalam melaksanakan pengembangan *e-Government* dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses informasi dan layanan pemerintahan, serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan dengan menggunakan media internet.
- Layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara pelayanan publik yang dibentuk untuk mendorong “*no wrong door policy*” untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun & jenis apapun

disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. Dinas Komunikasi dan Informatika atas nama Pemerintah daerah Kabupaten Gresik berperan melakukan monev pengelolaan pengaduan kepada seluruh Unit Kerja dengan dapat melibatkan APIP sebagai pengawas internal

- c. Fasilitasi Pengintegrasian Aplikasi pendukung kinerja atau Sistem Informasi Manajemen (SIM) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- d. Layanan *Maintenance*, Penyediaan Jaringan komputer dan Internet. Komputer dan jaringan internet adalah produk teknologi yang rentan gangguan serta kerusakan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pemeliharaan komputer dan pengecekan jaringan secara berkala.
- e. Fasilitasi akses koneksi internet dan intranet bagi seluruh institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan agar dapat meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f. *Collecting data* dan *security data* agar seluruh informasi yang dibutuhkan baik untuk institusi pemerintah maupun masyarakat dapat terkendali dalam satu sistem data center serta menghasilkan data dan informasi yang *uptodate*/terkini dan *real time*. Dinas Komunikasi dan Informatika meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan mempersiapkan media layanan Media Center.
- g. Kemudian dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat guna terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyajikan informasi tersebut dalam bentuk website atau portal. Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan perangkat operasional hardware dan software jaringan

serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas agar mekanisme komunikasi antar SKPD berjalan efektif dan efisien.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Hambatan/permasalahan dapat diidentifikasi antara lain :

- Masih belum optimalnya cakupan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi
- Masih banyak sistem informasi dan database perangkat daerah yang belum terintegrasinya
- Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
- Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK, terutama infrastruktur berbasis FO
- Banyaknya panggilan darurat dari masyarakat yang menyalahgunakan NTPD 112
- Gresik belum memiliki *Complaint Handling System* desa yang berbasis Teknologi Informasi
- Akses internet dan telekomunikasi masyarakat belum merata di beberapa ruang publik dan terdapat area yang masih *blankspot*
- Masih belum maksimalnya layanan publik berbasis elektronik
- Kurang tersedianya Pedoman Tata Kelola dan Manajemen SPBE
- Proses Penganggaran SPBE Belum Terkoordinasi
- Dalam bidang SPBE masih terdapat beberapa hal yang masih minim dan belum maksimal dalam penerapannya misalkan : 1. manajemen SPBE, 2. Audit SPBE, 3. SDM Pengelola SPBE
- Teknologi yang sangat cepat berkembang : Industri 4.0 ->Artificial Intelligence, Big Data, Internet Of Thing
- Kurangnya Peran Perangkat Daerah dalam Penerapan SPBE

- Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi
- Kurangnya kesadaran perangkat daerah terhadap data yang dapat dipublikasikan
- Masih rendahnya tingkat keamanan pengelolaan informasi dan data
- Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilandaskan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- Sulitnya mendapatkan data dengan jenis dan kedalaman tertentu, karena keterbatasan kewenangan serta belum tersedianya Regulasi tentang Satu Data
- Kegiatan Rakor rencana perubahan perda telekomunikasi bersama pada kegiatan fasilitasi sarana komunikasi daerah tidak tercapai dikarenakan adanya pandemi covid-19
- Masih adanya kesenjangan pemanfaatan Teknologi Informasi (*Digital Divide*) antara Desa dan Kota menyebabkan belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat

2.3.3. Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026, Tugas dan Fungsi Diskominfo termasuk dalam **Misi ke-1** yaitu *Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif*. Dalam rangka pencapaian misi pertama di atas maka ditetapkan **Tujuan ke-1** yaitu “*Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas berdasarkan Good and Clean Governance*”, tujuan ke-1 tersebut dijabarkan dalam sasaran pembangunan **Sasaran ke-1** sebagai berikut : “*Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi*” dengan indikator kinerja yang diampuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah *Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik*.

Penyelarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan serta penetapan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dijabarkan ke dalam rumusan sebagaimana berikut :

Pemetaan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Clean Governance</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indeks Inovasi Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target Indikator							Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Menciptakan Tata Kelola	Menghadirkan Tata Kelola	S.1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan	2,55	3,01	3,19	3,65	3,86	4,03	4,13	4,13	
	Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Clean Governance</i>		yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Berbasis Elektronik									

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Terdapat 3 Domain, 7 Aspek

dan 35 Indikator dalam penilaian SPBE sesuai dengan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Target Capaian Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah 3,65 dan terealisasi sebesar 4,28. Dengan demikian capaian Indeks SPBE Kabupaten Gresik adalah 117.26%. Capaian Indeks SPBE ini mengalami peningkatan dari tahun 2022, capaian Indeks SPBE tahun 2022 sebesar 3.27.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Adapun tantangan dalam pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik antara lain :

- a. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik, baik dampak positif maupun dampak negatif sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut.
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi yang masih sangat terbatas dan kurang merata di wilayah pemerintahan Kabupaten Gresik.
- c. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap teknologi, informasi dan komunikasi, sehingga masih terjadi kesenjangan pemahaman informasi di masyarakat.
- d. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur Pemerintah Daerah.
- e. Belum optimalnya keamanan pengelolaan data informasi.
- f. Terbatasnya kecepatan koneksi internet di wilayah pemerintahan kabupaten Gresik.
- g. Kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari pengetahuan IT.

Sedangkan peluang yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam pengembangan pelayanan antara lain :

- a. Komitmen kepala daerah untuk mendukung program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

- b. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Tersedianya media teknologi informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.
- d. Kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Meningkatnya sistem keamanan informasi bersifat rahasia yang memanfaatkan teknologi informasi.
- f. Pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan segera terciptanya Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2.3.5. Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Beberapa rekomendasi yang dilakukan dalam perumusan program kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

- Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia pengelola IT sampai tingkat operator di lingkungan pemerintahan dengan cara Fasilitasi dan Pendampingan.
- efisiensi dan efektifitas dalam kinerja dan pelayanan publik dalam bidang IT antara lain mencakup Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan Berbasis Elektronik, infrastruktur, aplikasi dan kelembagaan pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Gresik
- Fasilitasi dan koordinasi terkait pengaduan yang masuk kepada OPD penyelenggara pelayanan publik yang mengampuh/berwenang.
- monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan kepada seluruh Unit Kerja penyelenggara pelayan publik dengan melibatkan APIP sebagai pengawas internal
- Menyusun regulasi tentang keamanan informasi berdasarkan peraturan perundangan dan perkembangan teknolog
- Melaksanakan pembangunan teknologi informasi yang terintegrasi antar satu perangkat daerah dengan yang lainnya.

- Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
- Mengembangkan inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Mengoptimalisasi pembangun sistem komunikasi di area *blankspot*.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Meningkatkan Aksesibilitas telekomunikasi dan internet dengan menggunakan CSR atau bekerja sama *tower provider* dan *telco operator*.

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang. Beberapa **isu-isu strategis** dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

a. Implementasi SPBE

Implementasi SPBE di Kabupaten Gresik berkembang cukup signifikan, oleh karena itu perlu terus dikembangkan di berbagai aspek yang mendorong tercapainya efektifitas dan efisiensi kinerja dan pelayanan publik yang mencakup antara lain : Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan Berbasis Elektronik, infrastruktur, aplikasi dan kelembagaan pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Gresik. Aplikasi-aplikasi di seluruh OPD belum semuanya terintegrasi. Kebijakan SPBE belum mengikuti peraturan perundangan dan perkembangan teknologi, dalam hal Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE juga belum semuanya diterapkan berdasarkan kebijakan SPBE. Masih banyak layanan Pemkab Gresik yang belum berbasis elektronik

dan berjalan sendiri-sendiri (belum terpadu). Sangatlah *urgent* untuk dilakukan pengintegrasian sistem-sistem aplikasi yang ada di seluruh perangkat daerah, sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dalam kinerja dan pelayanan publik, serta memperkecil kerentanan ekosistem IT. Pengembangan dan penguatan penyediaan infrastruktur jaringan internet dan intranet Tetap dikembangkannya infrastruktur TIK terutama jaringan TIK berbasis FO (*Fiber Optic*) sehingga dapat diwujudkan kecepatan pelayanan jaringan, sehingga kinerja OPD-OPD dan fungsi pelayanan publik dapat maksimal dan tetap dikembangkannya *Gresik Smart City*.

Maka diperlukan suatu upaya yang dapat meningkatkan pemanfaatan seluruh usaha penerapan teknologi yang dapat mengimbangi besarnya sumber daya yang telah dicurahkan. Diperlukan sebuah sistem yang dalam bahasa teknis memiliki tingkat skalabilitas yang tidak terbatas, bukan hanya usaha visualisasi dari data yang ada, melainkan penyusunan solusi lengkap yang dapat menjadi platform akuisisi data sampai diseminasinya, pengolah Big-Data hingga analisisnya, serta menjadi ruang digital kolaboratif bagi seluruh Perangkat Daerah hingga Pemimpin Daerah untuk dapat benar-benar memanfaatkan data dalam tindakan-tindakan pemerintahan.

Platform yang dibutuhkan harus mampu menjadi jembatan dari seluruh proses bisnis sehingga memungkinkan penggunanya untuk melakukan cross-tabulation untuk menemukan relasi dari multivariable dari berbagai sumber data terstruktur maupun tidak terstruktur. Platform yang sama juga harus memanfaatkan penggunaan teknologi informasi geografis sehingga data pemerintahan dapat dilihat secara holistik untuk mendukung keputusan yang tepat guna. Pemerintah Kabupaten Gresik juga berharap dengan penyederhanaan tata kelola data ini dapat memberikan wawasan potensi penguatan PAD.

b. *Data Center/Ruang Server*

Dengan perkembangan teknologi digital 4.0 yang sangat pesat saat ini masyarakat dituntut untuk bergerak lebih cepat, praktis, efisien dan cenderung instan, sehingga Pemerintahan Kabupaten Gresik harus bergerak cepat, praktis, dan efisien. Kabupaten Gresik menjadi salah satu kabupaten di Indonesia dengan perubahan yang pesat, artinya sangat dibutuhkan tempat-tempat yang mempunyai fasilitas dengan kelengkapan sistem teknologi digital yang berstandar 4.0.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang menjadi pusat penyimpanan informasi, aplikasi dan data dirasa memerlukan pembaruan mengingat kebutuhan data yang semakin meningkat dan menampung perangkat Teknologi Informasi yang semakin banyak. Dengan pembaruan serta peningkatan kapasitas dan standarisasi ruang server, diharapkan tingkat availability-nya naik, server dan network uptime meningkat, serta perangkat-perangkat yang ada di dalamnya dapat termitigasi dengan baik apabila terjadi insiden atau kejadian yang tidak diharapkan demi tercapainya Arsitektur SPBE Nasional yang terpadu dan terintegrasi. Langkah awal yang harus dilakukan untuk mencapainya adalah dengan tersedianya Data center yang terstandarisasi dengan tingkat availability, uptime server, dan perangkat jaringan yang memadai

c. *Keterbatasan Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan IT*

Keterbukaan dan kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat serta pemenuhan penyelenggaraan SPBE perlu diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas di bidang IT dengan mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai bidangnya. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terampil di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menghadapi *digital government* yang membutuhkan transformasi budaya kerja aparatur dan masyarakat;

d. Keamanan Informasi

Di Kabupaten Gresik sedang gencar-gencarnya melakukan penerapan manajemen keamanan informasi secara optimal melalui penyusunan tata kelola keamanan informasi untuk meningkatkan nilai Indeks Keamanan Informasi. Regulasi tentang keamanan informasi masih belum mengikuti peraturan perundangan dan perkembangan teknologi sehingga perlu disusun secara bertahap dan menyelaraskan dengan penerapan manajemennya. Selain itu perlu dilakukan juga pembinaan kepada masyarakat khususnya terkait pengetahuan dan teknologi keamanan informasi. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan dengan cara berkoordinasi ke Dinas Kominfo Provinsi atau dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penerapan keamanan informasi di Kabupaten Gresik akah lebih optimal jika didukung dengan anggaran yang memadai.

e. Satu Data Kabupaten

Data memegang peranan strategis dalam transformasi digital sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan dan kebijakan secara tepat. Koordinasi pengelolaan data melalui forum Satu Data perlu lebih digaungkan lagi ke seluruh pemangku kepentingan. Beberapa kendala dalam mewujudkan satu data antara :

- Kesiapan infrastruktur dan manajemen data yang belum memadai
- Belum dilakukannya integrasi data dan masih terdapat permasalahan egosektoral yang memungkinkan tersedianya data yang berbeda antar instansi.
- Munculnya keraguan antar instansi untuk berbagi akses data
- Kurangnya SDM yang mampu mengelola data dengan baik
- Terdapat beragam referensi dan standar data
- Pemahaman kebijakan Satu Data belum dipahami secara merata.

Ke depannya, pengembangan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Gresik tidak hanya terbatas pada lingkup internal Pemerintahan saja, namun akan diterapkan lebih luas sesuai dengan konsep GRESIK SMART CITY. Konsep ini akan menempatkan Kabupaten Gresik sebagai kota cerdas sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan pengembangan ekonomi daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 didasarkan pada Surat Edaran Bupati Gresik nomor : 050/204/437.71/2025 tanggal 14 Maret 2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025

Tahun 2025 terdapat 5 program 12 kegiatan 40 sub kegiatan dengan total nilai pagu indikatif sebesar Rp. 16.634.523.111,00. Pada hasil analisa kebutuhan dana yang diusulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dirumuskan dari hasil rapat kerja Dinas Komunikasi dan arahan dari Kepala Dinas terdapat 5 program 12 kegiatan 42 sub kegiatan dengan nilai Pagu sebesar Rp. 41.907.001.367,00. Berikut disajikan rancangan Awal Renja tahun 2025 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Tabel 2.4 (Tabel T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

	Rancangan Awal RKPD (sesuai Surat Edaran Bupati Gresik)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
N o.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				16.634.523.111	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				41.907.001.367	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	5.804.009.321	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	10.313.033.330	
1	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan pelaporan	13 Dokumen/laporan	12.329.250	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan pelaporan	13 Dokumen/laporan	59.175.000	

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.986.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	35.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKJiP, LPPD, SAKIP, Laporan Monev Kegiatan)	12 Laporan	5.342.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKJiP, LPPD, SAKIP, Laporan Monev Kegiatan)	12 Laporan	24.175.000	
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	100%	4.643.435.029	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	100%	5.476.497.142	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/12 bulan	4.641.114.989	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/12 bulan	5.459.255.102	

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	860.150	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	8.321.020	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	1.459.890	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	8.921.020	
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Jumlah administrasi Kepegawaian perangkat daerah	2 sub kegiatan	0	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Jumlah administrasi Kepegawaian perangkat daerah	2 sub kegiatan	-	

6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	
7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	-	
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	-	
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Jumlah administrasi umum perangkat daerah	7 sub kegiatan	222.338.042	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Jumlah administrasi umum perangkat daerah	7 sub kegiatan	1.404.431.544	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	5.493.732	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	34.500.000	

			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	37.485.768	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	627.077.302	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.998.816	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	33.350.000	
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.232.868	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	140.932.500	
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	28.521.058	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	169.050.000	

1 4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	720.900	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	18.515.000	
1 5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan Dalam Daerah dan Luar Daerah	101.884.900	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan Dalam Daerah dan Luar Daerah	381.006.742	
5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 sub kegiatan	0	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 sub kegiatan	1.427.454.210	
1 6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	862.500.000	

1 7	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	306.204.210	
1 8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	258.750.000	
6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	770.013.000	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	1.111.725.434	
1 9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	208.350.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	370.960.271	
2 0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	10.785.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	147.965.163	

			Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
2 1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	550.878.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	592.800.000	
7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	2 jenis	155.894.000	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	2 jenis	833.750.000	
2 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	88.330.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	350.750.000	

2 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	67.564.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	483.000.000	
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		1. Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	100%	6.091.429.671	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		1. Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	100%	9.130.000.000	
			2. Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	100% (3/3)				2. Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	100% (3/3)		
			3. Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID	100%				3. Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID	100%		
8	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		1. Persentase OPD yang menindakla	95,7%	6.091.429.671	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		1. Persentase OPD yang menindakla	95,7%	9.130.000.000	

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		njuti pengaduan tepat waktu			PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		njuti pengaduan tepat waktu			
			2. Persentase panggilan kedaruratan yg ditindaklanj uti	100%				2. Persentase panggilan kedaruratan yg ditindaklanj uti	100%		
			3. Jumlah OPD yang menyediaka n Daftar informasi dan dokumenta si publik	9				3. Jumlah OPD yang menyediaka n Daftar informasi dan dokumenta si publik	9		
			4. Jumlah konten informasi pemerintah yang dipublikasik an	2010				4. Jumlah konten informasi pemerintah yang dipublikasik an	2010		
2 4	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 dokumen	27.917.350	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 dokumen	227.000.000	

25	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	24.517.600	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	283.000.000	
26	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	778.509.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	810.000.000	
27	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen	33.680.400	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen	280.000.000	
28	Layanan Hubungan Media		Jumlah Layanan Hubungan Media	1 layanan	4.616.039.950	Layanan Hubungan Media		Jumlah Layanan Hubungan Media	1 layanan	6.000.000.000	
29	Manajemen Komunikasi Krisis		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	1 dokumen	559.550.000	Manajemen Komunikasi Krisis		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	1 dokumen	825.000.000	

			Manajemen Komunikasi Krisis					Manajemen Komunikasi Krisis			
30	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	130 orang	0	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	130 orang	230.000.000	
31	penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 dokumen	42.740.000	penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 dokumen	240.000.000	
32	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	3 unit	8.475.371	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	3 unit	235.000.000	

	Kabupaten/Kota		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		1. Persentase OPD yang menerapkan manajemen Aset TIK	75%	4.605.875.497	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		1. Persentase OPD yang menerapkan manajemen Aset TIK	75%	19.670.091.037	
			2. Presentase OPD yang memanfaatkan ruang server	29%				2. Presentase OPD yang memanfaatkan ruang server	29%		
			3. Persentase OPD yang Menggunakan Sistem Penghubung Layanan	75%				3. Persentase OPD yang Menggunakan Sistem Penghubung Layanan	75%		
			1. Persentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi	100% (3/3)				1. Persentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi	100% (3/3)		

			2. Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	100% (47/47)				2. Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	100% (47/47)		
			3. Persentase aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi	73% (11/15)				3. Persentase aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi	73% (11/15)		
			4. Persentase OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	100%				4. Persentase OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	100%		
			5. Persentase OPD yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	100%				5. Persentase OPD yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	100%		
9	PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH		1. Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Intra	8.052 jam (92% dari 8.760 jam)	3.900.452.834	PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH		1. Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Intra	8.052 jam (92% dari 8.760 jam)	9.898.577.633	

	PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Pemerintah			PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Pemerintah			
			2. Jumlah OPD yang dibina untuk menerapkan manajemen Aset TIK	15				2. Jumlah OPD yang dibina untuk menerapkan manajemen Aset TIK	15		
33	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	3.900.452.834	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	9.898.577.633	
10	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		3. Jumlah VPS yang dikelola	195 VPS	705.422.663	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		3. Jumlah VPS yang dikelola	195 VPS	9.771.513.404	
			4. Jumlah API yang dikelola	22 API				4. Jumlah API yang dikelola	22 API		
			1. Jumlah pedoman pelaksanaan SPBE yang disusun dan dievaluasi	2				1. Jumlah pedoman pelaksanaan SPBE yang disusun dan dievaluasi	2		
			2. Jumlah Dokumen Perencanaan SPBE yang	2				2. Jumlah Dokumen Perencanaan SPBE yang	2		

			dievaluasi					dievaluasi			
			3. Jumlah Indikator Evaluasi SPBE yang dipenuhi Data Dukung dan Narasinya	47				3. Jumlah Indikator Evaluasi SPBE yang dipenuhi Data Dukung dan Narasinya	47		
			4. Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle)	11				4. Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle)	11		
			5. Jumlah layanan yang dikelola melalui service desk5.	33				5. Jumlah layanan yang dikelola melalui service desk5.	33		

3 4	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2 dokumen	19.753.450	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2 dokumen	300.000.000	
3 5	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 dokumen	22.110.000	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 dokumen	150.000.000	
3 6	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	- 12 Layanan	55.300.282	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	- 12 Layanan	7.048.911.650	

37	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	11 unit	438.985.900	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	11 unit	1.350.000.000	
38	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	12 layanan	49.370.300	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	12 layanan	372.601.754	
39	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	6 dokumen	64.034.781	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	6 dokumen	250.000.000	

40	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Bid. SPBE dan TI)		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	40.427.950	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Bid. SPBE dan TI)		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	200.000.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	15.440.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	100.000.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	33 % (10/30)	74.094.272	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	33 % (10/30)	1.100.000.000	
11	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH		Jumlah OPD yang mengumpulkan data statistik	45 OPD	74.094.272	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH		Jumlah OPD yang mengumpulkan data statistik	45 OPD	1.100.000.000	

	KABUPATEN/ KOTA		sektoral			KABUPATEN/ KOTA		sektoral			
			Jumlah OPD yang menyusun atau mengolah data secara terpilah gender	5 OPD				Jumlah OPD yang menyusun atau mengolah data secara terpilah gender	5 OPD		
			Jumlah Data Induk yang dikelola	4				Jumlah Data Induk yang dikelola	4		
4 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpul an, Pengolahan , Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dokumen	44.143.472	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpul an, Pengolahan , Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dokumen	375.000.000	
4 2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu		Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasn ya dalam	37 orang	29.950.800	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu		Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasn ya dalam	37 orang	225.000.000	

	Statistik Daerah yang Terintegrasi		Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			Statistik Daerah yang Terintegrasi		Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			
43	Pengembangan Infrastruktur		Jumlah Infrastruktur Statistik	2 unit	-	Pengembangan Infrastruktur		Jumlah Infrastruktur Statistik	2 unit	500.000.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Penanganan Serangan Cyber	100%	1.693.877.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Penanganan Serangan Cyber	100%	1.693.877.000	
12	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Jumlah OPD yang Menerapkan Manajemen Keamanan Informasi	9	1.693.877.000	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Jumlah OPD yang Menerapkan Manajemen Keamanan Informasi	9	1.693.877.000	
44	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan	-1 Laporan	6.616.400	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan	-1 Laporan	279.508.669	

	Kabupaten/Kota		Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			Kabupaten/Kota		Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
4 5	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota Berdasarkan Elektronik dan Non Elektronik	-1 Laporan	52.497.950	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota Berdasarkan Elektronik dan Non Elektronik	-1 Laporan	1.414.368.331	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan forum Renja Perangkat Daerah Diskominfo Tahun 2025 dihadiri dari beberapa kalangan : perwakilan masyarakat, kalangan media, Akademisi, stakeholder, dll. Usulan anggaran didasarkan dari perkembangan digitalisasi dan Teknologi Informasi dan juga peningkatan layanan informasi public kepada masyarakat. Selain itu juga untuk peningkatan infrastruktur terhadap penyediaan bandwidth bagi layanan public pemerintah dan bandwidth bagi masyarakat di tempat-tempat umum, Peningkatan infrastruktur dan operasional pada Command Center sebagai layanan cepat pengambilan kebijakan pimpinan dan wadah pelayanan dan informasi cepat bagi masyarakat. hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan berdasarkan pelaksanaan Forum Perangkat daerah Renja Tahun 2025.

Table 2.4 **(Tabel T-C.32)**
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
 Tahun 2025
 Kabupaten Gresik
 Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Gresik	800 Mbps 12 Bulan	Penyediaan kebutuhan internet kabupaten sebagai sarana Mendukung Pemerintahan Digital
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten Gresik	5 paket	- Pembangunan Ruang Server Baru, server clustering dan server backup - server enygma dan storage untuk server Enygma
3	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten Gresik	- 10 layanan - 1 aplikasi	- Pengintegrasian Layanan Publik OPD - Pengembangan Aplikasi SID dan OpenDK

4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Gresik	1 paket	Lisensi, Cloud dan Pendampingan Platform Operasional Intelijen Kota Pintar (IOP Enygma)
5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaten Gresik	1 aplikasi	Pengembangan Platform Gresikpedia
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kabupaten Gresik	1 penilaian	pencapaian indek SPBE
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
7	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten Gresik	56 OPD/instansi	koordinasi, sosialisasi dan bintek untuk pengelola aplikasi pengaduan
8	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Gresik	1 website	Pemeliharaan website gresikkab.go.id
9	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Gresik	1 website	penyusunan dan publikasi Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) pada website PPID
10	Manajemen Komunikasi Krisis	Kabupaten Gresik	1 aplikasi layanan panggilan darurat	Pengembangan Command Centre
11	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kabupaten Gresik	56 OPD/instansi	Pelatihan/Bimtek pemberitaan Gresiknewsroom
12	penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan	Kabupaten	56	Komite Komunikasi Digital

	Kemitraan Komunitas	Gresik	OPD/instansi	(KKD) Kabupaten Gresik
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Gresik	56 OPD	pengumpulan data satu data sebagai wali data
14	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten Gresik	56 OPD	pelatihan penyusunan data satu data
15	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten Gresik	1 aplikasi	pemeliharaan aplikasi dashboard pimpinan satu data kabupaten gresik
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
16	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Gresik	300 orang	Pemenuhan rekomendasi hasil sertifikat ISO 27001 - Security Governance, Junior Cyber Security, SMKI bagi OPD
17	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Gresik	300 digital signature	penanganan keamanan informasi bagi OPD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa terkait dengan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, maka Pemerintah perlu menaruh perhatian khususnya mengenai informasi yang wajib dibuka untuk publik, informasi yang dikecualikan, dan juga mekanisme penanganan sengketa informasi. Pemerintah Kabupaten Gresik juga harus memperhatikan penyelenggaraan *website*, konten, Sumber Daya Manusia serta infrastrukturnya.

Selain itu juga berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpres No. 95/2018 tentang SPBE. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa terdapat beberapa urusan, salah satunya adalah urusan komunikasi dan informatika yang menangani masalah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain serta Pengelolaan *e-Government*.

Pemerintah dapat menggunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik serta diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap Pemerintah.

Penjabaran Program Nasional, Pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan (UU No. 32/2009).

Dalam capaian Program Nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik memiliki kontribusi mengampuh indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai berikut :

- a. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (1 indikator);
- b. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (3 indikator);
- c. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (2 indikator);
- d. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (4 indikator).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terkait dengan Pembangunan Ekonomi, melalui publikasi isu strategis pemerintah Kabupaten Gresik dan upaya penanganannya. Mendukung capaian prioritas daerah dalam Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi. Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan. Selain itu tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah meningkatkan *awareness* masyarakat, khususnya terkait isu strategis penanggulangan kemiskinan, dimana salah satu indikatornya adalah *stunting*. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain, mengupdate isi website gresikkab.go.id, membuat flyer edukasi, aktif dalam pemberitaan media sosial pemerintahan (youtube, IG, Facebook dan twitter).

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, perlu ditetapkan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program secara umum serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan misi ke-1 pembangunan daerah Kabupaten Gresik : *“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta Mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif”*, maka ditetapkan pada tujuan ke-1 untuk lima tahun ke depan yaitu *“Menghadirkan Tata kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas berdasarkan Good and Clean Governance”*. Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran ke-1 : *“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”*

Berlandaskan terhadap keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Tujuan dan Sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025, maka Tujuan dan Sasaran Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025

Tujuan Renstra dan Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Sasaran Renstra	Target
			2025
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih	1. Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik	1. Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	92,3%

akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi Indikator : Indeks SPBE	Pemerintah Daerah Yang disediakan	2. Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	141
		3. Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	1820
	2. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	85% (7.446 jam dari 8.760 jam)
	3. Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	1. Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	100%
		2. Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	75%
	4. Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	4 rekom
	5. Meningkatnya keamanan sistem elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	40

3.3. Program dan Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 telah mempertimbangkan beberapa faktor antara lain :

1. Mendukung prioritas pembangunan nasional, yaitu :
 - a. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
 - b. Memperkuat infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
2. Mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur, yaitu :
 - a. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur
 - b. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur

3. Mendukung prioritas pembangunan tematik Kabupaten Gresik, yaitu :

- a. Gresik Akas : Penguatan Reformasi Birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan
- b. Gresik Mapan : Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 yang diusulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat 5 program 11 kegiatan 38 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 16.299.207.495.000,00. Terdapat penyesuaian kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Table 2.7 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Gresik
Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian 2025	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				16.299.207.495				39.822.625.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				16.172.248.873				35.374.570.000
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		100%	5.730.633.330			100%	11.410.806.000
2.16.01.2.01	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen/laporan perencanaan dan capaian kinerja SKPD		13 Dokumen/laporan	12.246.049			13 Dokumen/laporan	80.323.600
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	6.903.865	APBD		1 Dokumen	50.323.600

2.16.01.2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	5.342.184	APBD		12 Laporan	30.000.000
2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan		100%	4.643.435.029			100%	5.605.266.856
2.16.01.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		32 Orang/bulan	4.641.114.989	APBD		34 orang/12 bulan	5.585.180.612
2.16.01.2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		13 Laporan	2.320.040	APBD		1 laporan	9.543.122
2.16.01.2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		0	-	APBD		12 laporan	10.543.122
2.16.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah administrasi Kepegawaian perangkat daerah		2 sub kegiatan	-			2 sub kegiatan	462.000.000
2.16.01.2.05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	-	APBD		1 Paket	95.000.000
2.16.01.2.05.0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	350.000.000

2.16.01.2.05.1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 orang	-	APBD		50 orang	17.000.000
2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	persentase fasilitasi ketersediaan operasional dan administrasi umum perangkat daerah		100%	216.444.052			7 sub kegiatan	1.555.425.131
2.16.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.492.141	APBD		1 Paket	33.292.900
2.16.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	37.485.760	APBD		6 Paket	720.176.000
2.16.01.2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	4.997.373	APBD		1 Paket	33.000.000
2.16.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	43.232.276	APBD		1 Paket	169.205.000
2.16.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	22.633.802	APBD		2 Paket	177.000.000
2.16.01.2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4 Dokumen	718.200	APBD		4 Dokumen	19.310.000
2.16.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	101.884.500	APBD		2 Laporan Dalam Daerah dan Luar Daerah	403.441.231
2.16.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	-			2 sub kegiatan	1.544.890.983

2.16.01.2.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	-	APBD		2 unit	850.000.000
2.16.01.2.07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	APBD		20 Unit	324.890.983
2.16.01.2.07.1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	APBD		1 unit	370.000.000
2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	734.038.000			3 jasa	1.183.404.288
2.16.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	172.400.000	APBD		5 Laporan	384.611.000
2.16.01.2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		19 Laporan	10.760.000	APBD		3 Laporan	175.993.288
2.16.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		19 Laporan	550.878.000	APBD		19 Laporan	622.800.000
2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah		100%	124.470.200			2 jenis	979.495.142
2.16.01.2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8 Unit (7 unit R-4, 1 unit R-2)	88.320.000	APBD		7 Unit	350.000.000

2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	36.150.200	APBD		1 Unit	629.495.142
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi		100%	4.955.140.045			100%	4.080.433.000
		2. Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi		100% (3/3)				100% (3/3)	
		3. Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID		100%				100%	
2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase OPD yang menindaklanjuti pengaduan tepat waktu		95,7%	4.955.140.045			95,7%	4.080.433.000
		2. Persentase panggilan kedaruratan yg ditindaklanjuti		100%				100%	
		3. Jumlah OPD yang menyediakan Daftar informasi dan dokumentasi publik		9				9	
		4. Jumlah konten informasi pemerintah yang dipublikasikan		2010				2010	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media		1 Laporan	3.532.978.700	APBD		1 dokumen	335.000.000
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		6 Komunitas	42.740.000	APBD		1 dokumen	355.000.000

2.16.02.2.01.0 017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		1 Permohonan	32.630.400	APBD		1 dokumen	1.050.000.000
2.16.02.2.01.0 019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		3 Rekomendasi	580.072.350	APBD		1 dokumen	315.000.000
2.16.02.2.01.0 021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		2 Media	742.550.995	APBD		1 layanan	750.000.000
2.16.02.2.01.0 023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik		1675 Konten	24.167.600	APBD		1 dokumen	950.433.000
2.16.02.2.01.0 024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan		- Orang	-	APBD		130 orang	325.000.000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Bid SPBE : 1. Persentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi		100% (3/3)	5.486.475.498			75%	19.883.331.000
		2. Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi		100% (47/47)				29%	
		3. Persentase aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi		73% (11/15)				75%	
		4. Persentase OPD yang Bekerjasama dalam Penerapan SPBE		100%				100% (3/3)	
		5. Persentase OPD yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE		100%				100% (47/47)	

		Bid. TI : 1 Persentase OPD yang menerapkan management Aset TIK		75% (36/47)				73% (11/15)	
		2. Presentase OPD yang memanfaatkan ruang server		29% (14 OPD / 48 OPD)				100%	
		3. Persentase OPD yang Menggunakan Sistem Penghubung Layanan		75% (36/47)				100%	
2.16.03.2.02	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Bidang SPBE : 1. Jumlah dokumen kebijakan dan tata kelola SPBE yang disusun dan dievaluasi		4 dokumen	5.486.475.498			195 VPS	19.883.331.000
		2. Jumlah Indikator Evaluasi SPBE yang dipenuhi Data Dukung dan Narasinya		47 indikator				22 API	
		3. Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle)		11 aplikasi				2	
		4. Jumlah layanan elektronik yang dikolaborasikan		33 layanan				2	
		5. Jumlah layanan yang dikelola melalui service desk		33 layanan				47	
		Bidang TI : 1. Jumlah PD yang dibina untuk menerapkan manajemen Aset TIK		15 PD				11	

		2. Jumlah VPS yang dikelola		195 VPS				33	
		3. Jumlah API yang dikelola		22 API				33	
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional		100 Aplikasi	55.300.282			2 dokumen	500.000.000
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		4 Laporan	35.193.450	APBD		2 dokumen	200.000.000
2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan		2 Dokumen	188.410.000	APBD		- 1 Unit	6.869.550.288
2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		3 Dokumen	71.337.950	APBD		15 unit	450.000.000
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		11 Aplikasi	202.175.900	APBD		- 14 Layanan	353.202.997
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		12 Aplikasi	49.370.300	APBD		6 dokumen	542.301.000
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas		6 unit	58.234.781	APBD		1 dokumen	400.000.000
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		46 Perangkat Daerah	4.826.452.835	APBD		1 Unit	10.568.276.715

2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				67.844.272				1.002.890.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun		33 % (10/30)	67.844.272			33 % (10/30)	1.002.890.000
		2. Persentase PD yang Menerapkan Manajemen Data		75% (36/47)					
2.20.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Jumlah OPD yang menyusun atau mengolah data secara terpilah gender		5 OPD	67.844.272			55 OPD	1.002.890.000
		2. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang memperoleh rekomendasi statistik		15 kali				6 OPD	
2.20.02.2.01.0 007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		54 Orang	23.700.800	APBD		1 dokumen	440.000.000
2.20.02.2.01.0 009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		0 Persentase	-	APBD		37 orang	260000000
2.20.02.2.01.0 010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		2 Dokumen	44.143.472	APBD		2 unit	302.890.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				59.114.350				3.445.165.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penanganan Serangan Cyber		100%	59.114.350			100%	3.445.165.000
2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah OPD yang Menerapkan Manajemen Keamanan Informasi		9	59.114.350			12 PD	3.445.165.000

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA								
2.21.02.2.01.0 002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	6.616.400	APBD		-1 Laporan	307.459.535
2.21.02.2.01.0 003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1 Laporan	52.497.950	APBD		-1 Laporan	3.137.705.465

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Di Tahun 2025, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik merencanakan 5 program 12 kegiatan 37 sub kegiatan, berikut disajikan rencana kegiatan beserta jumlah pendanaan setiap kegiatan secara detail pada tabel di bawah ini

Tabel 2.8
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKAB. GRESIK

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional	Daerah					
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						16.299.207.495,00		39.822.625.000							
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.658.092.506,00								35.374.570.000	
	2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						11.531.133.884,00								35.374.570.000	
1	2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100 %		100 %	100 %	1.089.518.341,00						100 %	11.410.806.000		
	2	16	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen/laporan perencanaan dan capaian kinerja SKPD	-		100 %	100 %	12.246.049,00			-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-	-	80.323.600		
1	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	6.903.865,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		50.323.600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																

[illegible]

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	5.492.141,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		33.292.900	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
6	2	1 6	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	37.485.760,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		720.176.000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	
7	2	1 6	0 1	2.0 6	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	4.997.373,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		33.000.000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	
8	2	1 6	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	43.232.276,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		169.205.000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	
9	2	1 6	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	22.633.802,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		177.000.000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	

10	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	718.200,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		19.310.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40 Laporan	101.884.500,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		403.441.231	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		1 Unit	0,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-	-	1.544.890.983		
12	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	0,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		324.890.983	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase fasilitasi ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-		100 %	100 %	734.038.000,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-	-	1.183.404.288	

1 3	2	1 6	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	3 Laporan	172.400.000,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		384.611.000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
1 4	2	1 6	0 1	2.0 8	000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Laporan	3 Laporan	10.760.000,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		175.993.288	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
1 5	2	1 6	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			19 Laporan	19 Laporan	550.878.000,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		622.800.000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA
	2	1 6	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase fasilitasi ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-		100 %	100 %	124.470.200,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-	-	979.495.142	
1 6	2	1 6	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			8 Unit	8 Unit	88.320.000,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta	-		350.000.000	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA

																pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan				
17	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	36.150.200,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		629.495.142	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi 2. Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID 3. Persentase jenis informasi pulik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	-			100 % 100% (3/3) 100% (3/3)	4.955.140.045,00						-	4.080.433.000	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah konten informasi pemerintah yang dipublikasikan 2. Jumlah PD yang menyediakan Daftar informasi dan dokumentasi publik 3. Persentase PD yang menindaklanjuti pengaduan tepat waktu	-			- 2010 Konten - 9 OPD - 95,7 %	4.955.140.045,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-	-	4.080.433.000	
18	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media														
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	3.532.978.700,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		335.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
19	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														

							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				1 Komunitas	42.740.000,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		355.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
20	2	16	02	201	0017	Pelayanan Informasi Publik														
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				1 Permohonan	32.630.400,00	Kab. Gresik Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		1.050.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
21	2	16	02	201	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				1 Rekomendasi	580.072.350,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		315.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
22	2	16	02	201	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 Media	742.550.995,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		750.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
23	2	16	02	201	0023	Penyusunan Konten														
							Jumlah Konten Informasi Publik				1 Konten	24.167.600,00	Kab.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan	-		950.433.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

															responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan						
24	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik															
							Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				130 Orang	0,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		325.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Bidang SPBE : 1. Prosentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi 2. Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi 3. Persentase OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE 4. Persentase aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi 5. Persentase OPD yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE Bidang TI : 1. Presentase OPD yang Memanfaatkan Ruang Server 2. Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Aset TIK 3. Persentase OPD yang Menggunakan Sistem Penghubung Layanan	-			- 100% (3/3) - 100% (47/47) - 100% - 73% (11/15) - 100% - 29% (14 OPD / 48 OPD) - 75% (36/47) - 75% (36/47)	5.486.475.498,00						-		19.883.331.000	

	2	1	0	2.0		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang SPBE : 1.Jumlah dokumen kebijakan dan tata kelola SPBE yang disusun dan dievaluasi 2. Jumlah Indikator Evaluasi SPBE yang dipenuhi Data Dukung dan Narasinya 3. Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle) 4. Jumlah layanan elektronik yang dikolaborasikan 5. Jumlah layanan yang dikelola melalui service desk Bidang TI : 1. Jumlah PD yang dibina untuk menerapkan manajemen Aset TIK 2. Jumlah VPS yang dikelola 3. Jumlah API yang dikelola	-				- 4 dokumen - 47 indikator - 11 aplikasi - 33 layanan - 33 layanan	5.486.475.498,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-	-	19.883.331.000	
25	2	1	0	2.0	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional															
							Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional					100 Aplikasi	55.300.282,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		500.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
26	2	1	0	2.0	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda															
							Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda					4 Laporan	35.193.450,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
27	2	1	0	2.0	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau revisi arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah															

							Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	188.410.000,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		6.869.550.288	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
28	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
							Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				3 Dokumen	71.337.950,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		450.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
29	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				8 Aplikasi	202.175.900,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		353.202.997	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
30	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				12 Aplikasi	49.370.300,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		542.301.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
31	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				6 unit	58.234.781,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis	-		400.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

																satu data pembangunan				
32	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				46 Perangkat Daerah	4.826.452.835,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		10.568.276.715	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						67.844.272,00							1.002.890.000	
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun Persentase PD yang Menerapkan Manajemen Data	33%			33 % 75 %	67.844.272,00						33%	1.002.890.000	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang memperoleh rekomendasi statistik Jumlah PD yang menyusun atau mengolah data secara terpilah gender	-			15 Kali 5 OPD	67.844.272,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-	-	1.002.890.000	
33	2	20	02	2.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				37 Orang	23.700.800,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		440.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
34	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				0 Persentase	0,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart	-		260.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

																Governance berbasis satu data pembangunan				
35	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	44.143.472,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		302.890.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						59.114.350,00							3.445.165.000	
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penanganan Serangan Cyber	100 %			100 %	59.114.350,00						100 %	3.445.165.000	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menerapkan manajemen keamanan informasi	-			9 OPD	59.114.350,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-	-	3.445.165.000	
36	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	6.616.400,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		307.459.535	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
37	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	52.497.950,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		3.137.705.465	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

																satu data pembangunan					
	X					NON URUSAN						4.641.114.989,00							5.585.180.612		
	X	X X				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.641.114.989,00							5.585.180.612		
6	X	X X	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.641.114.989,00						-	5.585.180.612		
	X	X X	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.641.114.989,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-	-	5.585.180.612		
3 8	X	X X	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					32 Orang/b ulan	4.641.114.989,00	Kab. Gresik	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		5.585.180.612	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A	
	J U M L A H											16.299.207.495,00							39.822.625.000		

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik untuk tahun anggaran 2025, mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik pada Tahun 2025, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras serta dengan dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang-bidang agar konsisten dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kebijakan yang dilakukan :

- peningkatan kualitas informasi melalui media elektronik pada konten Situs Web Pemerintah Kabupaten Gresik dengan mengutamakan Keterbukaan informasi secara aktual dan faktual dalam koridor *e-Government* guna menggugah partisipasi publik secara konstruktif untuk mendukung pembangunan daerah.
- optimalisasi sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik.
- optimalisasi penggunaan perangkat lunak sistem operasional dan program *open source* untuk menekan belanja pembelian perangkat lunak berbayar.
- peningkatan profesionalitas, kreativitas, dan kompetensi aparatur.

- Melakukan Monitoring Basis data di tiap OPD,
- Melakukan Pengembangan data warehouse dengan pengaplikasian SiMantra Builder
- Kebijakan optimalisasi sistem informasi dan sistem aplikasi bagi peningkatan kinerja aparatur dan efektivitas fungsi organisasi perangkat daerah.
- Menyusun dan menerapkan standart data dalam pengelolaan data yang meliputi definisi operasional, metode perhitungan, satuan dan kedalaman data.
- Menetapkan Regulasi tentang Satu Data Dan Data Geospasial.
- penerapan manajemen keamanan informasi secara optimal melalui penyusunan tata kelola keamanan informasi untuk meningkatkan nilai Indeks Keamanan Informasi

Gresik,

2024

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



Dra. NINIK ASRUKIN, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19650307 199703 2 003